

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Government Accounting Standards (PSAP) No.07 on fixed assets in the National Unity and Politics (Kesbangpol) West Kalimantan province ranked that can affect the effectiveness and efficiency of financial statements that aim to improve accountability and Transparency in the enforcement of Good Government Governance. That is the way to know the level of application of classification, recognition, measurement of assets, an initial assessment: cost components, construction in progress, the acquisition of a consolidated basis, the exchange of assets, asset donations, expenditures after the acquisition, the next measurement at initial recognition: depreciation, revaluation, penghentian and release, and disclosure of fixed assets.

The method used in this study is a comparative descriptive method and qualitative descriptive method by taking a population of fixed asset data in 2013. The total sample of 10 people who were determined using purposive sampling. Data collection techniques in this study using interviews, questionnaires /questioner (internal control questioner), observation, and documentation. And for processing the data in the order preparation, classification, processing, and interpretation of the data processing.

The results of this study to demonstrate the extent of the application of fixed assets by the Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 that has not been fully implemented, accompanied by the level of internal controls and the level of understanding that is less effective and efficient.

Keywords : *Fixed Assets, Accountability and Transparency, Good Governance Government, the Government Accounting Standards (PSAP) No. 07, Classification of Fixed Assets, Fixed Assets Recognition, Measurement Fixed Assets, Fixed Assets Initial Assessment: Component Costs, Construction In Work, In Joint Acquisition, Asset Exchange, Asset Donation, Spending After Acquisition, Measurement Next On Initial Recognition: Depreciation, revaluation , Pengehentian and Release, and Disclosure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 mengenai aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada penegakkan *Good Government Governance*. Yaitu dengan cara mengetahui tingkat penerapan klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset, penilaian awal : komponen biaya, konstruksi dalam pengerjaan, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, aset donasi, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya pada pengakuan awal : penyusutan, penilaian kembali, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil populasi data aset tetap pada tahun 2013. Total sampel penelitian sebanyak 10 orang yang ditentukan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, angket/*questioner (internal control questioner)*, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk pengolahan data dengan urutan penyusunan, klasifikasi, pengolahan, dan interpretasi hasil pengolahan data.

Hasil dari penelitian ini dengan menunjukkan seberapa besar tingkat penerapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 bahwa belum sepenuhnya menerapkan dengan disertai tingkat pengendalian internal dan tingkat pemahaman yaitu kurang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Aset Tetap, Akuntabilitas dan Transparansi, *Good Government Governance*, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Awal Aset Tetap : Komponen Biaya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Perolehan Secara Gabungan, Pertukaran Aset, Aset Donasi, Pengeluaran Setelah Perolehan, Pengukuran Berikutnya Pada Pengakuan Awal : Penyusutan, Penilaian Kembali, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan